

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Asri Agustiwi, Herlina, Deni Yusup Permana, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- . *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- FoEkh, Daniel Yusmic P. *Perpu dalam Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- . *Prinsip-Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting Pedoman Bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- . *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis Fungsi dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- . *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Diedit oleh Muhammad Fauzan Zarkasi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Laritmas, Selfianus, dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif*

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. Jakarta: Kencana, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 10 ed. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.

MPR-RI. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. 16 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani edisi revisi*. 16 ed. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prenada Media, 2016.

Wheare, K. C. *Modern Constitutions*. Edited by Nurainun Mangunsong. Translated by Imam Baehaqi. Bandung: Nusa Media, 2018.

Artikel Jurnal

Arsil, Fitra. “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>.

Basyir, Abdul. “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif.”

IUS Kajian Hukum dan Keadilan II, no. 5 (2014): 285–306.

Busiri, Ahmad, Erlina, dan Mirza Satria Buana. “Problematika Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

Jurnal Pemikiran Hukum Universitas Lambung Mangkurat 1, no. 1 (2023).

Dondokambey, Sarah Malena Andrea. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi XI, no. 2 (February 2023).

Hanifah, Ifat. “Analisis Urgensi Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 01, no. 01 (2020): 15–25.

Harijanti, Susi Dwi. “Perppu sebagai Extra Ordinary Rules: Makna dan Limitasi.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 01 (2017): 77–91.

Huda, Ni'matul. “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 557–77. <https://doi.org/10.31078/jk1041>.

Habiburohman, Ilham. “Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 21–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art2>.

Hsb, Ali Marwan. “Pemuatan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” 3, no. 1 (2021): 30–45.

Isra, Saldi. “Hubungan Presiden Dan DPR.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 399–416. <https://doi.org/10.31078/jk1032>.

Junaidi, Veri, and Violla Reininda. “Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai.” *Jurnal JENTERA* 3, no. 1 (2020): 216–39. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>.

Kurniawan, M. Beni. “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 455. <https://doi.org/10.31078/jk1531>.

Landau, David. “Abusive Constitutionalism.” *UC Davis Law Review* 47 (2013):

189–260.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edslex&AN=edslexC995257A&lang=es&site=eds-live>.

Levinson, Sanford, and Jack M. Balkin. “Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design.” *Minnesota Law Review* 94, no. 6 (2010): 1789–1866.

Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti. “Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 222–43. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1>.

Muntoha. “Demokrasi dan Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 379–395.

Rikardo, Ofis, Salma Shafiyah, dan Narida Salsabila Azzahra. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Seajar Pemerintah Pengganti Undang-.” *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024): 108–23.

Rikardo, Ofis, Syawalludin, dan Raka Justitia. “Eksistensi Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 339–54. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.3230>.

Rohim, Nur. “Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa.” *Jurnal Cita Hukum II*, no. 1 (June 2014): 117–32.

Santoso, Belinda Carissa. “Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.” *Mimbar Keadilan* 13, no. 1 (2020): 12–21.

Sari, Putri Kemala. “Pengambilan Keputusan Secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018): 122–43.

Satrio, Abdurrachman. “Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo’s Government: What Can the Constitutional Court Do?”

Constitutional Review 4, no. 2 (2018): 271–300.

Sihombing, Deus Levolt, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, and Mahmul Siregar. “Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 11–20. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>.

Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan yang Memaksa’ dalam Penerbitan Perppu.” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 58–70.

Suhariyanto, Didik. “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 190–207.

Peraturan Perundang-Undangan dan Lampirannya

“Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-Undang,” n.d.

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (n.d.).

“Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib,” n.d.

“Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang,” n.d.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (n.d.).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (n.d.).

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Decease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nas,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” n.d.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” n.d.

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (n.d.).

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang,” n.d.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (n.d.).

“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Decease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Me,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun ,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan,” n.d.

“Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014,” n.d.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XV/2017,” n.d.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014,” n.d.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024,” n.d.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,” n.d.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023,” n.d.

- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XV/2017,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVI/2018,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017,” n.d.

Laporan Penelitian, Risalah Rapat, Hasil Publikasi, Book Chapter, Prosiding
Bulmer, W. Elliot. *Emergency Powers; International IDEA Constitution-Building
Primer 18. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(International IDEA)*. Stockholm: International Institute for Democracy and

Electoral Assistance, 2018. <https://doi.org/10.31752/idea.2018.29>.

———. *What Is a Constitution? Principles and Concepts; International IDEA Constitution-Building Primer 1. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)*, 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, RDPU I, Rabu 26 Januari 2011,” 2011.

Gustaliza, Resma Bintani. “Mengurai Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Guna Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.” In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, 84–111. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.

Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda. “Penguujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji,” 2020.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Amelia, Chintya Insani. “Penilaian Keselarasan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 2024.

Hadi, Ismet. “Kegunaan Naskah Akademik dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang.” Universitas Gadjah Mada, 2014.

Irawan, Candra Dwi. “Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 2023.

Maulidi, Mohammad Agus. “Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektik Negara Hukum dan Demokrasi.” Universitas Islam Indonesia, 2021.

Yasir, Al. “Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai Legislatif Model Hukum Darurat di Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 2024.

Hasil Wawancara

“Hasil Wawancara dengan Bapak Roberia; Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; Kementerian Hukum RI; Pada 11 Maret 2025,” n.d.

“Hasil wawancara dengan Ibu Khopiatuziadah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya; Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; Badan Keahlian DPR RI; Sekretariat Jenderal DPR RI, Pada 23 Februari 2025,” n.d.

Artikel dan Laman Situs Web

Arimbi, Arnie Fenia. “Presiden Lantik Tiga Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.” Edited by Fitri Supratiwi. Antara, 2015. <https://www.antaranews.com/berita/481042/presiden-lantik-tiga-pelaksana-tugas-pimpinan-kpk>.

Asril, Sabrina. “Ini Alasan Jokowi Berhentikan Sementara Abraham Samad Dan Bambang Widjojanto,” 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/17314681/Ini.Alasan.Jokowi.Berhentikan.Sementara.Abraham.Samad.dan.Bambang.Widjojanto>.

Humas Fraksi PKS. “DPR Tidak Mengesahkan Perpu Cipta Kerja Jadi UU.” Fraksi PKS DPR RI, March 2023. <https://fraksi.pks.id/2023/03/14/dpr-tidak-mengesahkan-perpu-cipta-kerja-jadi-uu/>.

Prabowo, Panca Hari. “Presiden Dijadwalkan Lantik Pimpinan Sementara KPK.” Edited by Fitri Supratiwi. Antara, 2015. <https://www.antaranews.com/berita/481036/presiden-dijadwalkan-lantik-pimpinan-sementara-kpk>.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). “Belum Disetujui Dalam Paripurna DPR, Perppu Ciptaker Langgar Syarat Formil Harus Segera Dicabut: Stop Ugal-Ugalan Praktik Legislasi,” February 2023. <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/belum-disetujui-dalam-paripurna-dpr-perppu-ciptaker-langgar-syarat-formil-harus-segera-dicabut->

[stop-ugal-ugalan-praktik-legislasi/](#).

Shafira, Ima Dini. “DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Di Rapat Paripurna Hari Ini.”

Tempo.co, March 2023. <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-perpu-cipta-kerja-di-rapat-paripurna-hari-ini-206839>.

Syah, Moch Harun. “Busyro Muqoddas Resmi Pensiun, KPK Tetap Bekerja

Normal,” 2014. <https://www.liputan6.com/news/read/2149375/busyro-muqoddas-resmi-pensiun-kpk-tetap-bekerja-normal>.